



ပြည်နယ်ပြည်သုတေသန  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

ନାନୁ ସତ କର୍ଥି ଲୋକାବାସିନ୍ଦ୍ରା  
“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)  
TAHUN 2019**



**BIRO HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI**



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019**



**BIRO HUKUM DAN HAM  
SETDA PROVINSI BALI  
TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, salam prajawibawa, puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan : Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

LAKIP sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah provinsi Bali, yaitu terwujudnya **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar bidang dan antar instansi terkait serta diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan assistensi narasumber. Mudah-mudahan LAKIP Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Terima kasih pula kami sampaikan kepada semua pihak khususnya seluruh staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali atas terselesaiannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Tahun 2019.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 31 Desember 2019

Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Bali,





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
GAMBARAN UMUM .....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
GRAFIK ANGGARAN .....	9
GRAFIK PERSENTASE .....	10
DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 .....	11
DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 .....	13
DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 .....	15
PENUTUP.....	17
LAMPIRAN .....	18



## GAMBARAN UMUM

### A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di samping Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dijabarkan (terakhir) dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tahun 2019, merupakan wujud pertanggungjawaban mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Biro dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi



Pemerintah provinsi Bali, yaitu terwujudnya "**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan LAKIP Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian dalam Negeri.



- 
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali;

**B. Maksud dan Tujuan**

1. LAKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali berupa kegiatan Rutin dan Pembangunan selama Tahun Anggaran 2019.
2. Sebagai evaluasi hasil Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan maupun kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana, serta kendala yang dihadapi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bidang Pembangunan Hukum.

**C. Ruang Lingkup**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah membantu Gubernur dalam pembangunan hukum di Provinsi Bali dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan instansi pemerintah berupa pembuatan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan informasi hukum.

**a) Tugas Pokok**

Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah Mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam pembangunan hukum di Provinsi Bali dengan menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum.

**b) Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Biro Hukum dan HAM



mempunyai tugas pokok **membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang hukum.** Adapun fungsi yang diemban oleh Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pembahasan perumusan rancangan produk hukum;
2. Melakukan evaluasi dan kajian hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum;
4. Melaksanakan program Strategis Rencana Aksi Nasional HAM;
5. Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM;
6. Melakukan advokasi dan upaya hukum terhadap permasalahan yang timbul;
7. Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota;
8. Menyiapkan bahan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
9. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan mempublikasikan serta mendokumentasikan produk hukum;
10. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum;
11. Mengolah bahan, data, dan menyiapkan rumusan Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali.

**c) Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2019 terdiri dari Kepala Biro dan Tiga (3) Kepala Bagian. Lebih lanjut secara rincian susunannya sebagai berikut:

- Kepala Biro Hukum dan HAM.
  - A. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
    - 2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
    - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;



- B. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, membawahi:
- 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
  - 2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
  - 3) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III;
- C. Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi:
- 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - 2) Sub Bagian Litigasi; dan
  - 3) Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tahun 2019, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 69 orang dengan status :

➤ PNS : 32 orang  
➤ Non PNS : 37 orang  
Jumlah : 69 orang

berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S3	-
2	S2	10
3	S1	18
4	D3	-
5	SLTA	4
6	SLTP	-
7	SD	-
JUMLAH		32



Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

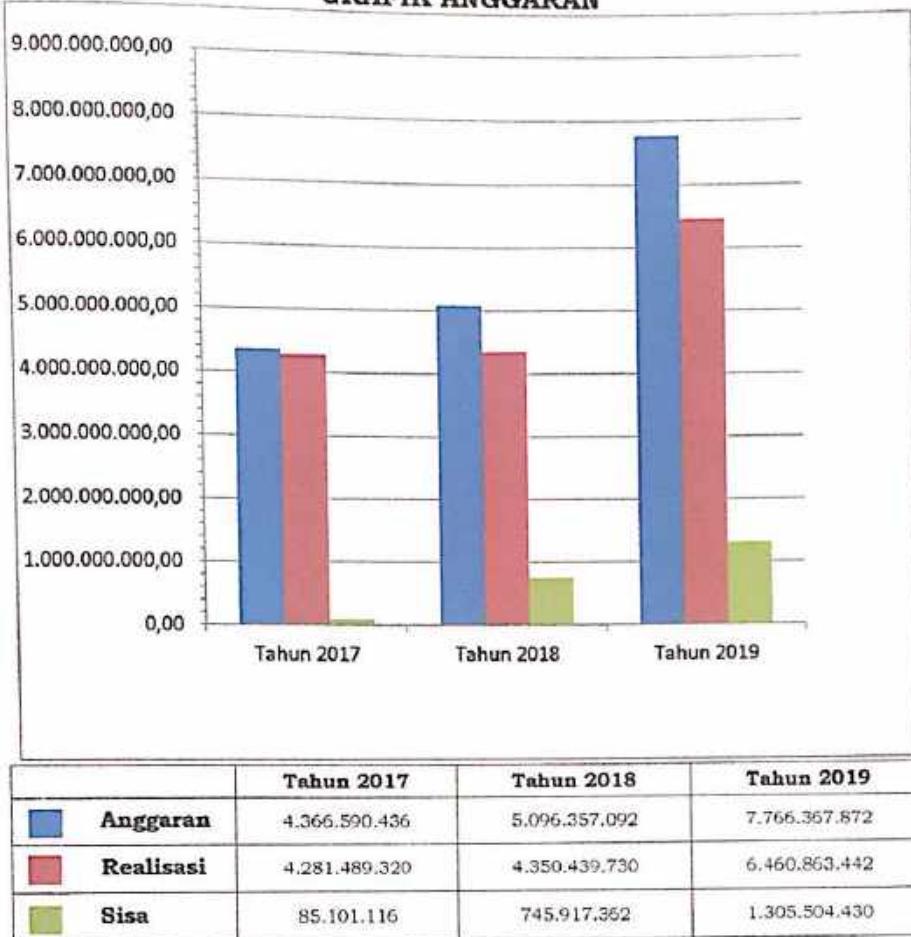
No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	3
3	III	21
4	IV	8
JUMLAH		32

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kediklatan

No	Jenis Kediklatan	Jumlah Orang
1	Struktural	12
2	Fungsional	-
3	Pemerintah	-
4	Teknis	-
5	Diklat Dasar	20



### GRAFIK ANGGARAN





#### GRAFIK PERSENTASE

TAHUN ANGGARAN	PAGU	%	REALISASI	%
2017	4.366.590.436	16,71	4.281.489.320	27,49
2018	5.096.357.092	14,32	4.350.439.730	1,58
2019	7.766.367.872	34,37	6.460.863.442	32,66
2020	7.240.217.945	7,73		

#### Anggaran

- Anggaran pada Tahun 2017 meningkat sebesar (16,71%) dari Anggaran Tahun 2016;
- Anggaran pada Tahun 2018 meningkat sebesar (14,32%) dari Anggaran Tahun 2017;
- Anggaran pada Tahun 2019 meningkat sebesar (34,37%) dari Anggaran Tahun 2018;
- Anggaran pada Tahun 2020 meningkat sebesar (7,73%) dari Anggaran Tahun 2019.

#### Realisasi

- Realisasi pada Tahun 2017 meningkat sebesar (27,49%) dari Anggaran Tahun 2016;
- Realisasi pada Tahun 2018 meningkat sebesar (1,58%) dari Anggaran Tahun 2017;
- Realisasi pada Tahun 2019 meningkat sebesar (32,66%) dari Anggaran Tahun 2018.

**DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2017**

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>								
A. Program Pengembangan Produk Hukum	1.281.327.300	1.258.914.158	98,25	401.709.329			100	
1. Penyusunan Raperda	701.468.000	695.118.890	99,09	6.349.110	5	12	100	raperda
2. Penyusunan Pergub	73.470.000	69.831.200	95,05	3.638.800	60	106	100	pergub
3. Pengkajian Produk Hukum Kab./Kota	97.740.500	96.638.916	98,87	1.101.584	25	26	100	perhub/ walikota
4. Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	178.648.800	172.380.929	96,49	6.267.871	50	568	100	PH kab/kota
5. Penyusunan Produk Hukum Penetapan	135.000.000	132.505.407	98,15	2.494.593	1600	2510	100	kepgub
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab./Kota	95.000.000	92.439.416	97,30	2.560.584	6	10	100	Raperda kab/kota
B. Program Bantuan Hukum dan HAM	1.787.047.000	1.764.415.065	98,73	291.662.833			83	
1. Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	30.000.000	28.631.100	95,44	1.368.900	400	400	100	NPHD
2. Penanganan Perkara	1.542.718.000	1.533.976.238	99,43	8.741.762	6	19	100	perkara
3. Pendampingan Hukum	60.000.000	53.573.516	89,29	6.426.484	10	3	33	orang
4. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah HAM	154.329.000	148.234.211	96,05	6.094.789	25	25	100	orang
C. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	767.358.136	731.459.307	92,40	942.496.199			100	
1. Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	202.329.000	199.812.175	98,76	2.516.825	600	600	100	PH
2. Menghimpun dan Menyebarluaskan Produk Hukum Pusat dan Daerah	134.314.416	131.141.741	97,64	3.172.675	400	400	100	Buku

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% %	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
3. Pelatihan Teknis JDIH	100.329.000	95.641.440	95,33	4.687.560	35	35	100	orang
4. Rapat Koordinasi Hukum dan HAM	170.385.720	150.603.824	88,39	19.781.896	30	30	100	orang
5. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum	160.000.000	154.260.127	96,41	5.739.873	150	150	100	orang
<b>D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>185.500.000</b>	<b>184.349.000</b>	<b>99,38</b>	<b>28.572.000</b>			<b>100</b>	
1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.000.000	2.965.000	98,83	35.000	1	1	100	paket
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000	25.000.000	100	0	17	17	100	jenis
3. Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	17.500.000	17.485.000	99,91	15.000	4	4	100	jenis
4. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.786.000	97,86	214.000	1	1	100	paket
5. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.000.000	129.113.000	99,32	887.000	2	2	100	paket
<b>E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>345.358.000</b>	<b>342.351.190</b>	<b>99,13</b>	<b>63.535.062</b>			<b>100</b>	
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100	0	1	1	100	paket
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	271.200.000	268.981.482	99,18	2.218.518	11	11	100	unit
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	14.832.500	98,88	167.500	12	12	100	unit
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	49.658.000	49.037.208	98,75	620.792	3	3	100	paket
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Mebelur	4.500.000	4.500.000	100	0	1	1	100	paket
<b>JUMLAH</b>	<b>4.366.590.436</b>	<b>4.281.489.320</b>	<b>97,58</b>	<b>85.101.116</b>	-	-	<b>100</b>	

**DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2018**

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>								
A. Program Pengembangan Produk Hukum	1.917.901.006	1.514.540.729	80,52	403.360.277	1.766	3.036	100	
1. Penyusunan Raperda	1.169.462.282	948.583.836	81,11	220.878.446	10	13	100	raperda
2. Penyusunan Pergub	250.731.325	140.043.413	55,85	110.687.912	75	78	100	pergub
3. Pengkajian Produk Hukum Kab./Kota	113.274.333	85.415.316	75,41	27.859.017	25	25	100	perhub/walikota
4. Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	100.317.333	90.736.816	90,45	9.580.517	50	50	100	PII kab/kota
5. Penyusunan Produk Hukum Penetapan	193.657.400	162.592.035	83,96	31.065.368	1.600	2.860	100	kepjab
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab./Kota	90.458.333	87.169.316	96,36	3.289.017	6	10	100	Raperda kab/kota
B. Program Bantuan Hukum dan HAM	2.029.385.327	1.758.927.201	87,00	270.458.126	449	526	81,25	NPHD
1. Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	35.969.180	20.465.834	56,90	15.503.346	400	477	100	
2. Penanganan Perkara	1.684.709.172	1.508.124.784	89,52	176.584.388	16	13	81,25	perkara
3. Pendampingan Hukum	81.970.875	74.739.491	91,18	7.231.384	13	13	100	orang orang
4. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah HAM	226.736.100	155.597.092	68,62	71.139.008	25/20	23	100	
C. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	720.741.927	658.940.038	91,00	61.801.889	1.180	1.192	89,60	
1. Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	186.269.130	164.446.262	88,28	21.822.868	600	612	100	PII
2. Menghimpun dan Menyebarluaskan Produk Hukum Pusat dan Daerah	127.485.432	123.389.432	96,79	4.096.000	400	400	100	Buku

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
3. Pelatihan Teknis JDIIH	104.892.316	84.054.514	80,13	20.837.802	0	0	48,00	orang
4. Rapat Koordinasi Hukum dan HAM	139.593.600	130.519.366	93,50	9.074.234	30	30	100	orang
5. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum	162.501.449	156.530.464	96,33	5.970.985	150	150	100	orang
<b>D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>58.500.000</b>	<b>56.417.500</b>	<b>96,00</b>	<b>2.082.500</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	
1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.500.000	0	0	1.500.000	1	1	100	paket
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000	29.949.000	99,83	51.000	17	17	100	jenis
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	100	0	4	4	100	jenis
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.475.000	73,75	525.000	1	1	100	paket
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.993.500	99,87	6.500	1	1	100	paket
<b>E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>369.828.832</b>	<b>361.614.262</b>	<b>98,00</b>	<b>8.214.570</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100</b>	
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.500.000	0	0	1.500.000	1	1	100	paket
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	344.828.832	338.129.262	98,06	6.699.570	11	11	100	unit
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7.000.000	7.000.000	100	0	12	12	100	unit
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	14.985.000	99,90	15.000	3	3	100	paket
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Mebelur	1.500.000	1.500.000	100	0	1	1	100	paket
<b>JUMLAH</b>	<b>5.096.357.092</b>	<b>4.350.439.730</b>	<b>85,00</b>	<b>745.917.362</b>			<b>94,17</b>	

**DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2019**

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>								
A. Program Pengembangan Produk Hukum								
1. Penyusunan Raperta	2.102.450.916	1.788.243.760	85,06	314.207.156	8	10	125,00	Raperta
2. Penyusunan Perhub	700.859.924	409.169.136	58,38	291.690.788	75	67	89,33	Perhub
3. Pengkajian Perda Kab/Kota dan Perbup/Perwali	91.352.776	88.545.295	96,93	2.807.481	50	617	1234,00	rancangan PH
4. Pembinaan dan Monitoring Produk Hukum Kab/Kota	181.456.792	171.342.759	94,43	10.114.033	50	54	108,00	rancangan PH
Penyusunan Produk Hukum Penetapan	256.429.676	244.550.278	95,37	11.879.398	2000	2978	148,90	kpugug
B. Program Bantuan Hukum dan HAM								
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	14.088.200	13.514.400	95,93	573.800	300	798	266,00	NPHD
2. Pengembangan Perkara	2.505.146.452	2.044.069.471	81,59	461.076.981	12	12	100,00	perkara
3. Pendampingan Hukum	103.890.008	100.859.795	97,08	3.030.213	16	18	112,50	orang
4. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah HAM	166.577.348	128.691.217	77,26	37.886.131	30	30	100,00	Aparatur kab/kota
5. Bantuan Hukum Kepada masyarakat Miskin	85.886.000	74.552.220	86,80	11.333.780	8	11	137,50	perkara non litigasi
C. Program Pembinaan dan Dokumentasi Hukum								
1. Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	125.773.532	117.977.324	93,80	7.796.208	400	400	100,00	PH
2. Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	62.613.504	79.253.210	95,93	3.360.294	40	40	100,00	orang
3. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum	184.590.876	175.052.502	94,63	9.538.374	75	75	100,00	orang
4. Penyebarluasan Produk Hukum Pusat dan Daerah	131.021.608	127.733.195	97,49	3.288.413	200	360	180,00	buku
5. Penyamaan Persopai Pembangunan Hukum dan HAM	153.402.988	130.888.794	85,32	22.514.194	30	30	100,00	orang

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran 1 Tahun (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)	Fisik			Satuan
					Target	Realisasi	%	
D. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja				-				
1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.500.000	2.500.000	100,00	-	1	1	100,00	paket
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000	30.000.000	100,00	-	17	17	100,00	jenis
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	19.949.400	99,75	50.600	4	4	100,00	jenis
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.475.000	99,00	25.000	1	1	100,00	paket
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.979.800	99,60	20.200	1	1	100,00	paket
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	4.900.000	98,00	100.000	1	1	100,00	paket
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	314.495.584	306.225.942	97,37	8.269.642	11	11	100,00	unit
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	13.000.000	12.631.500	97,17	368.500	10	10	100,00	unit
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	32.000.000	32.000.000	100,00	-	5	5	100,00	paket
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Mebelur	5.000.000	4.350.000	87,00	650.000	1	1	100,00	paket
11. Penyusunan dan Pelaporan Capaian Kinerja	451.331.688	346.408.444	76,75	104.923.244	6	6	100,00	buku
Jumlah	7.766.367.872	6.460.863.442	91,96	1.305.504.430				158



## PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tahun 2019 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Evaluasi Internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan capaian target yang telah disusun Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Tahun 2019, Kinerja Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali termasuk kategori sangat baik dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dimasing-masing OPD pelaksana kegiatan di Lingkungan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.

Dalam mewujudkan capaian diatas, banyak hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup OPD, meningkatkan etos kerja, penegakan disiplin pegawai, meningkatkan kopentensi aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023.



LAKU Tahun 2012  
Biro Hukum dan HAM Setkab Provinsi Bali

# LAMPIRAN

**DAFTAR NAMA DAN JUMLAH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI BALI**

NO	NAMA PEGAWAI  2	JENIS KELAMIN  3	PANGKAT / GOLONGAN  4	JABATAN  5
1	Ida Bagus Gede Sudarsana, SH 19691010 199703 1 012	L	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Biro Hukum dan HAM
2	Luh Gde Aryani Kerianwan,SH,M.Si 19750602 200003 2 004	P	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi
3	I Putu Suarta,SH,MH 19681010 199403 1 016	L	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota
4	Ngurah Satria Wardana,SH,MH 19770510 200212 1 001	L	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM
5	Desak Nyoman Surati, S.Sos 19621231 198212 2 002	P	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
6	I Gusti Ngurah Oka Suryateja,SH,MH 19681231 198903 1 051	L	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II
7	LA PT. Swasti Susanti Widhana,SH,MH 19690721 199603 2 002	P	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum
8	Tjok Istri Srimas Pemayun,SH,MH 19750209 199903 2 009	P	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
9	Agung Herwanto,SH,M.Si 19630315 199603 1 002	L	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM
10	Made Asih Darmayanti,SH,M.Si 19740808 200003 2 010	P	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan
11	Ni Luh Ayu Suasti,SH 19651231 198603 2 157	P	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I
12	Desak Made Onik Listyewati,SH 19740404 200801 2 013	P	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III
13	Sagung Agung Made Mas Mertha, SH 19620407 198303 2 021	P	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Litigasi
14	I Ketut Budiyasa,SH 19611023 200604 1 002	L	Penata Tk. I (III/d)	Pelaksana
15	Ni Luh Putu Sugi Martini,SH 19670331 199203 2 006	P	Penata (III/c)	Pelaksana

16	Komang Sriasih, SH 19720406 199703 2 004	P	Penata (III/c)	Pelaksana
17	Cekorda Putra Suryadarma,SH 19661018 199403 1 009	L	Penata (III/c)	Pelaksana
18	I Wayan Sujana,S.Sos 19740204 200003 1 001	L	Penata (III/c)	Pelaksana
19	Ayu Putu Soka,SH 19660930 200003 2 003	P	Penata (III/c)	Pelaksana
20	Anak Agung Mirah Terisnawati, SH 19770605 200803 2 001	P	Penata (III/c)	Pelaksana
21	Ni Luh Putu Darwati,SH,MH 19750305 201001 2 007	P	Penata (III/c)	Pelaksana
22	Luh Putu Anggreni Wijayanti,SH 19801111 201101 2 005	P	Penata (III/c)	Pelaksana
23	I Putu Eka Puspitha,SH 19761004 200801 1 001	L	Penata Muda Tk. I (III/c)	Pelaksana
24	Dewi Agung,AP,SH 19740504 200901 2 004	P	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
25	I Ketut Parwata 19611231 198511 1 019	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
26	Ni Luh Mangku Arini,SH 19691218 199703 2 008	P	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
27	I Dewa Agung Gede Manu,SH,MH 19770518 199803 1 003	L	Penata (III/c)	Pelaksana
28	I Wayan Muliarta,SH 19820210 200801 1 013	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
29	Tegar Bagus Albert Sanger,SH 19880414 201503 1 006	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
30	Putu Edy Sastrawan,SH 19900422 201503 1 002	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
31	I Kadek Suwardana 19641223 200604 1 006	L	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana
32	I Wayan Sumerta 19821109 200901 1 005	L	Pengatur (II/c)	Pelaksana
33	I Made Agus Widnyana 19810323 200901 1 016	L	Pengatur (II/c)	Pelaksana

**DIKLAT KEPEMIMPINAN PARA PEJABAT PADA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROV. BALI**

No	NAMA	ESELON	GOL	DIKLAT YANG SUDAH DILAKUKAN	NO SERTIFIKAT	TAHUN LULUS
1	Ida Bagus Gede Sudarsana,SH 19691010 199703 1 012	Eselon II	IV/b	PIM TK. IV  PIM TK. III	32938/ADUM/LAN/1999 1651/ADUM/DIKLAT/PROV/1999 459/I.22/DIKLAT PIM TK.III/LAN/2011	1999 2011
2	Luh Gde Aryani Koriawan, SH.,M.Si 19750602 200003 2 004	Eselon III	IV/a	PIM TK.IV  PIM TK.III	00000276/DIKLAT PIM TK.IV/51/5100/LAN/2017 000014071/DIKLAT PIM TK.III/7500/01/LAN-PEMProv BALI/2019	2017 2019
3	I Putu Suarta,SH,MH 19681010 199403 1 016	Eselon III	III/d	PIM TK. IV	00000265/DIKLATPIM TK.IV/51/5100/LAN/2017	2017
4	Ngurah Satria Wardana,SH,MH 19770510 200212 1 001	Eselon III	III/d	PIM TK. IV	0003224/DIKLATPIM TK.IV/7500/012/LAN-PEMProv BALI/2018	2018
5	I Gusti Ngurah Oka Surya Teja,SH,MH 19681231 198903 1 051	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	3747/I22/DIKLATPIM TK.IV/LAN/2007	2007
6	Tjok Istri Srimas Pemayun,SH,MH 19750209 199903 2 009	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	2171 / DIKLATPIM TK. IV/LAN/2004	2004
7	Agung Herwanto, SH,MH 19630315 199603 1 002	Eselon IV	III/d	ADUM	21337/ADUM/LAN/1998 1886/ADUM/DIKLAT/PROP 1998	1998
8	Ds.Ny.Surati, S.Sos.M.A.P 19621231 198212 2 002	Eselon IV	IV/a	ADUM	39335/ADUM/LAN/1997 993 3/2330/ADUM/DIKLAT PROP/1997	1998
9	Made Asih Darmayanti,SH,MH 19740808 200003 2 010	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	11.688/122/DIKLAT PIM TK.IV/LAN/2011	2011
10	Ida Ayu Putu Swasti Susanti Widhana,SH,MH 19690721 199603 2 002	Eselon IV	IV/a	PIM TK. IV	00000586/DIKLATPIM TK. IV/51/5171/LAN/2014	2014

**DAFTAR NAMA PEJABAT YANG BELUM MENGIKUTI DIKLAT PIM PADA BIRO HUKUM DAN HAM  
SETDA PROV. BALI**

No	NAMA	JABATAN	GOL	DIKLAT YANG BELUM DILAKSANAKAN
	Ida Bagus Gede Sudarsana,SH 19691010 199703 1 012	Eselon II	IV/b	PIM TK.II
	I Putu Suarta,SH,MH 19681010 199403 1 016	Eselon III	III/d	PIM TK.III
	Ngurah Satria Wardana,SH,MH 19770510 200212 1 001	Eselon III	III/d	PIM TK.III
	Ni Luh Ayu Suasti, SH 19651231 198603 2 157	Eselon IV	III/d	PIM TK.IV
1	Desak Made Onik Listyawati, SH 19740404 200801 2 013	Eselon IV	III/c	PIM Tk.IV

**RENCANA KENAikan PANGKAT, KENAikan GADAI BERPADA  
DALAM TINGKAT LULUKUM DAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2019**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	KENAikan PANGKAT	KENAikan GADAI BERPADA	TANGGAL	PENGARAH
1	Ida Bagus Gede Sudarsana, S11 126021010 199703 1 012	Pembina Tk. I (IV / b)			SABU 20 TAHUN	
2	Ni Ketut Adianti, SH,MH 19610511 198603 2 005	Pembina Tk. I (IV / b)			26/04/2019	
3	Bjok Istri Semas Pemagat, SH,MH 19750209 199803 2 009	Pembina (IV / a)		03/01/2019		
4	Cokorda Alit Sudarsana, SH,MH 19721010 199803 1 021	Pembina (IV / a)			SABU 20 TAHUN	
5	Agung Herwanto,S11,M,Si 19630315 199603 1 002	Pembina (IV / a)			SABU 20 TAHUN	
6	I Putu Suarta,SH,MH 19681010 199403 1 016	Penata Tk. I (III / d)		03/01/2019	SABU 20 TAHUN	
7	Ni Luh Ayu Suasti,SH 19651231 198603 2 157	Penata Tk. I (III / d)		03/01/2019	SABU 20 TAHUN	
8	I Ketut Budiyasa,SH 19611023 200604 1 002	Penata Tk. I (III / d)		04/01/2019	SABU 20 TAHUN	13/01/2019
9	Desak Made Omik Listyawati, SH 19740404 200801 2 013	Penata (III / c)			SABU 12 TAHUN	
10	Ni Luh Putri Sugi Martin,SH 19670331 199203 2 006	Penata (III / c)		03/01/2019		
11	Cokorda Putra Suryadarma,SH 19661018 199403 1 009	Penata (III / c)		04/01/2019		
12	I Wayan Sujana, S,Sos 19740204 200003 1 001	Penata (III / c)		03/01/2019		
13	Luh Putu Anggreni Wijayanti, SH 19801111 201101 2 005	Penata Muda Tk. I (III / b)	04/01/2019	03/01/2019		

14	Ayu Putu Soka, SH 19660930 200003 2 003	Penata (III/c)		03/01/2019	SLKS 10 TAHUN	
15	Dewi Agung,AP, SH 19740504 200901 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)		04/01/2019	SLKS 10 TAHUN	
16	Ni Luh Mangku Arini,SH 19691218 199703 2 008	Penata Muda Tk. I (III/b)			SLKS 20 TAHUN	
17	I Dewa Agung Gede Manu, SH,MH 19770518 199803 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	04/01/2019	03/01/2019	SLKS 20 TAHUN	
18	I Putu Eka Puspitha,SH 19761004 200801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	10/01/2019	04/01/2019	SLKS 10 TAHUN	
19	I Wayan Muliarta,SH 19820210 200801 1 013	Penata Muda (III/a)	10/01/2019	04/01/2019	SLKS 10 TAHUN	
20	Tegar Bagus Albert Sanger, SH 19880414 201503 1 006	Penata Muda (III/a)	04/01/2019	03/01/2019		
21	Putu Edy Sastrawan, SH 19900422 201503 1 002	Penata Muda (III/a)	04/01/2019	03/01/2019		
22	I Kadek Suardana 19641223 200604 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)		04/01/2019	SLKS 10 TAHUN	
23	I Made Agus Widnyana 19810323 200901 1 016	Pengatur (II/c)		10/01/2019		
24	Any Pujiati, SH 19720826 199803 2 008	Penata (III/c)			SLKS 20 TAHUN	
25	I Gusti Ngurah Oka Suryateja,SH,MH 19681231 198903 1 051				SLKS 30 TAHUN	
26	Anak Agung Mirah Terisnawati, SH 19770605 200803 2 001				SLKS 10 TAHUN	
27	I Ketut Parwata 19611231 198511 1 019	Penata Muda Tk. I (III/b)		11/01/2019		12/01/2019

**REALISASI KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA, SATYA LENCANA KARYA SATYA, PENSIUN  
PADA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI BALI TAHUN 2019**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	NOMOR SK KENAIKAN PANGKAT	NOMOR SK KENAIKAN GAJI BERKALA	NOMOR SLKS	NOMOR SK PENSJUN
1	Ida Bagus Gede Sudarsana, SH 19691010 199703 1 012	Pembina Tk. I (IV/b)			-	
2	Ni Ketut Adiani, SH,MH 19610511 198603 2 005	Pembina Tk. I (IV/b)				882/11962/mp/BKD 31 DESEMBER 2018
3	Tjok Istri Srimas Pemayun, SH,MH 19750209 199903 2 009	Pembina (IV/a)		822.4/010/KIN/ORG 16 JANUARI 2019		
4	Cokorda Alit Sudarsana, SH,MH 19721010 199803 1 021	Pembina (IV/a)			-	
5	Agung Herwanto,SH,M.Si 19630315 199603 1 002	Pembina (IV/a)			11112/4/2019 16 APRIL 2019	
6	I Putu Suarta,SH,MH 19681010 199403 1 016	Penata Tk. I (III/d)		822.3/015/KIN/ORG 16 JANUARI 2019	11111/4/2019 16 APRIL 2019	
7	Ni Luh Ayu Suasti,SH 19651231 198603 2 157	Penata Tk. I (III/d)		822.3/014/KIN/ORG 16 JANUARI 2019	11017/4/2019 16 APRIL 2019	
8	I Ketut Budiyasa,SH 19611023 200604 1 002	Penata Tk. I (III/d)		04/01/2019	11173/4/2019 16 APRIL 2019	882.2/10480/PP/BKD 9 Agustus 2019
9	Desak Made Onik Listyawati, SH 19740404 200801 2 013	Penata (III/c)			23717/4/2019 22 Nopember 2019	
10	Ni Luh Putu Sugi Martini,SH 19670331 199203 2 006	Penata (III/c)		822.3/013/KIN/ORG 16 JANUARI 2019		

11	Cokorda Putra Suryadarma,SH 19661018 199403 1 009	Penata (III/c)		822.3/021/KIN/ORG 16 JANUARI 2019		
12	I Wayan Sujana, S.Sos 19740204 200003 1 001	Penata (III/c)		822.3/012/KIN/ORG 16 JANUARI 2019		
13	Luh Putu Anggreni Wijayanti, SH 19801111 201101 2 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	823.2/1785/MP/BKD 8 PEbruari 2019			
14	Ayu Putu Soka, SH 19660930 200003 2 003	Penata (III/c)		822.3/016/KIN/ORG 16 JANUARI 2019	23720/4/2019 22 Nopember 2019	
15	Dewi Agung,AP, SH 19740504 200901 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)		822.3/020/KIN/ORG 16 JANUARI 2019	23750/4/2019 22 Nopember 2019	
16	Ni Luh Mangku Arini,SH 19691218 199703 2 008	Penata Muda Tk. I (III/b)			23623/4/2019 22 Nopember 2019	
17	I Dewa Agung Gede Manu, SH.MH 19770518 199803 1 003	Penata Muda Tk. I (III/c)	823.2/1787/MP/BKD 8 PEbruari 2019	822.3/011/KIN/ORG 16 JANUARI 2019	11134/4/2019 16 APRIL 2019	
18	I Putu Eka Puspitha,SH 19761004 200801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/c)	823.3/9859/MP/BKD 7 AGUSTUS 2019	822.3/019/KIN/ORG 16 JANUARI 2019	11197/4/2019 16 APRIL 2019	
19	I Wayan Muliarta,SH 19820210 200801 1 013	Penata Muda (III/b)	823.3/9852/MP/BKD 7 AGUSTUS 2019	822.3/022/KIIN/ORG 16 JANUARI 2019	11208/4/2019 16 APRIL 2019	
20	Tegar Bagus Albert Sanger, SH 19880414 201503 1 006	Penata Muda (III/b)	823.2/1784/MP/BKD 8 PEbruari 2019	822.3/009/KIN/ORG 16 JANUARI 2019		
21	Putu Edy Sastrawan, SH 19900422 201503 1 002	Penata Muda (III/b)	823.2/1786/MP/BKD 8 PEbruari 2019	822.3/008/KIN/ORG 16 JANUARI 2019		
22	I Kadek Suardana 19641223 200604 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)		822.2/5472/Bag.III/B.KumHAM 18 Desember 2018	11238/4/2019 16 APRIL 2019	

23	I Made Agus Widnyana 19810323 200901 1 016	Pengatur (II/c)		822.2/5732/Bag.III/8.XumHAM 2 OKTOBER 2019 11/01/2019		882/12587/PP/BKO 26-Sep-19
24	I Ketut Parwata 19611231 198511 1 019	Penata Muda Tk. I (III/b)				